



DPRD Kota Terima Puluhan Aduan

PERUBAHAN data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat memicu gelombang persoalan di wilayah Kota Yogyakarta. Akibat penataan ulang data tersebut, tidak sedikit warga kurang mampu yang mendadak terdepak dari status penerima bantuan sosial (bansos). Benar saja, kondisi ini berdampak langsung pada terhentinya akses penduduk terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, santunan kematian, hingga Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi mengungkapkan, pihaknya telah menerima puluhan aduan langsung dari masyarakat yang mengeluhkan kenaikan desil secara tiba-tiba, tanpa ada perubahan kondisi ekonomi yang signifikan. "Kalau yang datang atau mengadu secara personal ke

saya saja ditotal sudah puluhan. Mereka protes, bingung, kenapa tiba-tiba tidak mendapat PKH atau JPD," ujarnya, Rabu (26/8). "Begitu kita minta Dinas Sosial untuk pengecekan, ternyata status desilnya memang sudah naik. Padahal, faktanya di lapangan tidak sesuai dengan kriteria yang tertera dalam format desil itu," urai Solihul.

Ia menilai, penataan ulang data kesejahteraan yang dilakukan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial bersama BPS masih memiliki tingkat kekeliruan atau *margin of error* sangat tinggi. Hal ini mengingat pemutakhiran data secara nasional baru menasar sebagian kecil penduduk, namun dampaknya telah memutus hak-hak dasar masyarakat di daerah.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mengkritik jeda verifikasi dan validasi

(verval) data dari pusat yang memakan waktu per tiga bulan. Menurutnya, jeda waktu yang tergolong panjang itu tidak rasional jika dibenturkan dengan kebutuhan perut dan pemenuhan layanan dasar masyarakat sehari-hari. "Ibaratnya orang butuh makan dan bantuan, tidak bisa menunggu tiga bulan. Kita belum siap secara sistem, tapi masyarakat sudah dikorbankan. Sampai ada anekdot di kami, politisi paling sakti hari ini adalah politisi yang mampu mengubah desil warga," selorohnya.

Guna merespons kondisi krisis ini, Komisi D berkoordinasi bersama Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial, serta BPS Kota Yogyakarta. Legislatif mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan terobosan regulasi daerah, mengingat kekuatan fiskal dan kemampuan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta sebenarnya mencukupi untuk mengampuni warga terdampak.

Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah merombak Peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai skema penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang selama ini hanya menjangkau warga kategori desil 1-5. Pihaknya optimistis, begitu revisi Perwal ditandatangani, akses bantuan dasar bagi masyarakat yang terdampak kekacauan data desil dapat kembali dipulihkan.

"Hasil kesepakatan rapat bersama, kita desak agar cakupan JPD ini diperluas sampai desil 6. Karena faktanya banyak warga di desil 6 itu sebenarnya masih sangat tidak mampu. Tinggal menunggu revisi Perwal dari Pemkot agar punya legal standing yang kuat," tegasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005